

SENATOR



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI I / FEBRUARI 2025

TENAGA HONORER TERUS MEMBENGKAK: **REKRUTMEN PPPK MAKIN KISRUH**



KHUSUS

Citra DPD RI
Melonjak

11

NUSANTARA

DPD RI Siap Berkontribusi
Sukseskan Program MBG

13

SETJEN

Karo PHM Setjen DPD RI
Terima Siswa SMP Tiara Aksara

49

VARIA SENAT

BULD Minta Masukan APKASI
Soal Pelaksanaan UU Desa

37



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia



PANSUS dan Kepatuhan Daerah Merekrut Tenaga Honorer

Polemik seputar pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di berbagai daerah di Indonesia semakin memanas. Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan adanya ketidaksesuaian jumlah signifikan antara data pemerintah daerah dengan data pusat, salah satunya seperti yang terlihat di Kota Bandung. BKN mencatat jumlah tenaga non ASN sebanyak 8.158 orang, dengan formasi yang tersedia hanya untuk 790 orang. Ini menunjukkan selisih yang sangat besar, yakni 7.366 orang, yang menciptakan komplikasi serius dalam proses seleksi PPPK. Selisih jumlah mencapai ribuan, suatu angka yang tidak bisa dianggap remeh. Situasi ini mencerminkan ketidaksiapan beberapa daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan secara nasional.

Masalah utama muncul dari kebijakan penerimaan tenaga honorer yang masih berlangsung meskipun telah ada undang-undang yang membatasi hal tersebut, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN yang membatasi praktik tersebut. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Daerah-daerah yang terus menerima tenaga honorer pasca-undang-undang tersebut menambah kompleksitas masalah, karena tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdikan dan berharap mendapatkan legalitas sebagai PPPK.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai wakil dari kepentingan regional, harus proaktif dalam menangani kisruh ini. Komitmen DPD RI untuk menyelesaikan masalah melalui pembentukan panitia khusus (pansus) adalah langkah yang tepat, namun harus diikuti dengan aksi yang konkret. DPD RI harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mampu mengakomodasi kepentingan para tenaga honorer tanpa mengorbankan kedisiplinan dan ketertiban administrasi pemerintahan.

Solusi yang bisa diambil adalah dengan melakukan audit menyeluruh terhadap proses penerimaan tenaga honorer di setiap daerah pasca-penetapan UU ASN. Audit ini tidak hanya untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan data, tetapi juga untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah pusat harus bersikap tegas dalam menindaklanjuti hasil audit ini, termasuk memberikan sanksi kepada daerah yang melanggar aturan.

Terakhir, perlu adanya pembenahan sistemik dan penegakan hukum yang konsisten. Regulasi yang telah ada harus ditegakkan tanpa kompromi, terutama dalam membatasi penerimaan tenaga honorer baru sesuai dengan undang-undang. Dengan pendekatan yang disiplin dan adil, diharapkan kisruh tenaga honorer ini dapat diatasi, dan semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam regulasi. Tanpa *good will* dan komitmen bersama, akan sulit untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. (* /Intan Fitria Yuliani)

SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT: Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **PENANGGUNGJAWAB:** Mahyu Darma
PEMIMPIN REDAKSI: Heru Firdan; **REDAKTUR PELAKSANA:** Budi Fitra Helmi; **REDAKTUR FOTO & GRAFIS:** Agus Wiharto; **EDITOR SENIOR:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **TIM PENULIS ARTIKEL:** Heru Firdan, Budi Fitra Helmi, Intan Fitria Yuliani, Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat 10270. Email : keranjangsenator@gmail.com Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id // website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri



Special Committee and Regional Compliance Recruiting Honorary Staff

The controversy surrounding the appointment of honorary staff to government employment contracts (PPPK) in various regions of Indonesia is escalating. Data from the National Civil Service Agency (BKN) reveals significant discrepancies between the local government data and the central data, particularly as being evident in Bandung City. BKN recorded a total of 8,158 non-ASN personnel, for only 790 available positions. This represents a significant disparity of 7,366 people, creating serious complications in the PPPK selection process. Such substantial differences cannot be taken lightly. This situation reflects the unpreparedness of some regions in implementing nationally established policies.

The main issue arises from the ongoing policy of hiring honorary staff despite the existence of Law Number 20 Year 2023 on State Civil Apparatus, which restricts this practice. This highlights weaknesses in supervision and compliance with existing regulations. Regions that keep hiring honorary staff post-law add complexity to the issue, not only violating the law but also creating injustices for honorary staff who have long served and hoped to be legally accepted as PPPK.

The House of Regional Representative (DPD) RI, as a representative of regional interests, must be proactive in handling this

chaos. The DPD's commitment to resolve the issue through the formation of a special committee (PANSUS) is a proper step, nonetheless, it must be followed by concrete action. The DPD RI must ensure that every decision made accommodates the interests of the honorary staff without compromising the discipline and order of government administration.

Potential solution could involve conducting a comprehensive audit of the honorary staff hiring process in every region following the enactment of the ASN Law. The audit is not only intended to find and correct data errors but also to evaluate compliance with regulations. The central government must be firm in following up on the audit results, including imposing sanctions on regions that break the rules.

Finally, systematic improvements and consistent law enforcement are necessary. Existing regulations must be uncompromisingly enforced, especially in limiting the hiring of new honorary staff in accordance with the law. With a disciplined and fair approach, hopefully the turmoil surrounding honorary staff can be resolved, and all parties can contribute to achieve the goals set out in the regulations. Without goodwill and joint commitment, it will be difficult to achieve a sustainably fair solution for related parties. **(*Intan Fitria Yuliani)**

SENATOR
MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ADVISOR BOARD: Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **NEWS IN CHARGE:** Mahyu Darma **EDITOR-IN-CHIEF:** Heru Firdan; **MANAGING EDITOR:** Budi Fitra Helmi; **PHOTO & GRAPHICS EDITOR:** Agus Wiharto; **SENIOR EDITORS:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **GRAPHIC DESIGNER & PHOTOGRAPHER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **ARTICLE WRITER:** Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah.

EDITORIAL OFFICE News and Media Division, 1st Floor, Building B, DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6, Central Jakarta 10270.
Email: keranjangsenator@gmail.com Suggestions Box: majalah_senator@dpd.go.id // website: www.dpd.go.id // IG: @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri



TENAGA HONORER TERUS MEMBENGKAK: REKRUTMEN PPPK MAKIN KISRUH

Seleksi pengangkatan pegawai honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengalami kekisruhan di daerah. Pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah beberapa kali memperpanjang seleksi PPPK tersebut, namun belum juga tertuntaskan.

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Berbagai isu yang tidak sedap pun berkembang dalam seleksi PPPK di daerah. Mulai dari seleksi yang tidak transparan, jumlah tenaga honorer atau non ASN yang terus membengkak, sampai ke persoalan fiskal. Daerah tidak sanggup mengeluarkan gaji dari APBD untuk menggaji PPPK tersebut.

Kisruhnya seleksi pengangkatan PPPK ini oleh pemerintah daerah (pemda) mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Karena sesuai yang diamanatkan Undang-



Setda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menerima cendera mata dari Wakil Ketua III Komite DPD RI Bahar Buasan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai honorer dihapus paling lambat Desember 2024. Tetapi, kenyataannya sampai awal tahun 2025 ini masih banyak honorer yang tidak tertampung menjadi PPPK.

Karena itu, Komite I DPD RI melakukan kunjungan ke daerah untuk mendapatkan informasi yang akurat dari permasalahan yang dihadapi daerah dalam seleksi PPPK tersebut. Daerah yang dikunjungi adalah Provinsi Jawa Barat, Senin (20/1/2025). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), banyak pegawai honorer di Jawa Barat yang tidak bisa ditampung menjadi PPPK.

Mengacu pada data Kemendagri, jumlah pegawai

honorer di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencapai 27.417 orang. Sedangkan formasi PPPK di provinsi tersebut hanya tersedia 4.084 orang. Dengan demikian, masih ada sebanyak 23.353 orang yang tidak tertampung di PPPK.

“Rekrutmen PPPK ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai UU ASN. Komite I DPD RI memiliki atensi khusus dalam alih status dari honorer ke PPPK ini. Bulan Desember 2024 lalu kami telah melakukan rapat kerja dengan Menteri PANRB dan menyepakati bersama untuk mengangkat seluruh honorer menjadi PPPK,” kata Wakil Ketua Komite I Muhdi dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tersebut. (*)

Terungkap, Ini Penyebab Jumlah Honorer Membengkak

Arso P Nugroho

Penulis

Salah satu persoalan yang muncul dalam alih status pegawai honorer atau non aparatur sipil negara (ASN) adalah membengkaknya jumlah pegawai non ASN di daerah. Hal ini disebabkan karena daerah masih menerima pegawai honorer setelah terbitnya Undang-Undang (UU) 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga menimbulkan selisih data yang mencolok antara daerah dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Setidaknya hal tersebut terungkap dari kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (20/1/2025). Kunjungan kerja Komite I tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari permasalahan yang dihadapi daerah dalam proses penyeleksian PPPK. Komite I menyoroti besarnya selisih data pegawai non ASN di Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat.

Mengacu pada data yang diperoleh Komite I DPD RI dari pemerintah pusat, jumlah pegawai honorer di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencapai 27.417 orang. Sedangkan formasi PPPK di provinsi



Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memaparkan kondisi pegawai non ASN di Jawa Barat kepada rombongan Komite I DPD RI.

tersebut hanya tersedia 4.084 orang. Dengan demikian, masih ada sebanyak 23.353 orang yang tidak tertampung menjadi PPPK.

Rombongan Komite I DPD RI, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, setelah terbit UU ASN ternyata masih ada juga instansi dan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi tersebut yang mengangkat honorer dengan ikatan personal antara unit kerja dengan perorangan.

“Hal tersebut sebenarnya tidak boleh terjadi karena seharusnya apabila ada pengangkatan baru ditempatkan dengan status *outsourcing*,” ujar Herman. “Kami sudah tegaskan persoalan ini ke seluruh wilayah Jawa Barat tetapi masih ada saja

perekrutan non ASN oleh satuan kerja ataupun organisasi perangkat daerah (OPD) dengan alasan kekurangan SDM.”

Selain membengkaknya jumlah pegawai non ASN, masalah lainnya yang terjadi adalah kapasitas fiskal yang terbatas. Apalagi dengan ada pembatasan APBD untuk belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen. Saat ini, belanja ASN di Provinsi Jawa Barat mencapai 24 persen dan apabila digabung dengan *outsourcing* menjadi 29,4 persen. “Oleh sebab itu, penyelesaian masalah ini perlu tahapan dengan mengacu kepada arahan dari pemerintah pusat. Sehingga upaya penyelesaian jangka pendek tidak menimbulkan masalah baru ke depannya,” jelas Herman. (*)



Wawancara dengan Senator Aanya Rina Casmayanti: Perlu Diaudit Rekrutmen Honorer Pasca UU ASN

Theresia Oktavina

Penulis

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Jawa Barat Aanya Rina Casmayanti menegaskan, daerah yang melakukan penerimaan atau merekrut pegawai honorer atau non apatur sipil negara (ASN) setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan audit. Berikut petikan wawancaranya:

Bisa Anda jelaskan latar belakang kebutuhan audit terhadap rekrutmen pegawai non-ASN di Jawa Barat?

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas melarang pengangkatan pegawai non-ASN tanpa melalui mekanisme yang benar. Kita melihat di Jawa Barat ada peningkatan signifikan jumlah pegawai non-ASN yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga perlu ada tindakan konkrit untuk mengaudit proses ini.

Apa yang Anda temukan selama kunjungan kerja di Jawa Barat terkait dengan isu ini?

Saat kunjungan kerja ke Jawa Barat, kami mendapat in-

formasi bahwa terdapat pembengkakan jumlah pegawai non-ASN akibat rekrutmen yang terjadi setelah UU ASN diterbitkan. Ini sangat mengkhawatirkan karena ada sekitar 26.000 tenaga non-ASN yang belum diakomodasi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, yang sesuai dengan regulasi.

Bagaimana situasi ini mempengaruhi pelayanan publik di Jawa Barat?

Situasi ini sangat berdampak pada kualitas pelayanan publik. Rekrutmen pegawai tanpa seleksi yang memadai dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai bisa menurunkan standar layanan yang diberikan kepada masyarakat. Saat ini, belanja pegawai di Jawa Barat sudah mencapai 24 persen dari APBD, hampir 30 persen jika ditambah dengan tenaga *outsourcing*, ini merupakan beban fiskal yang cukup besar.

Apa yang Anda minta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian terkait?

Saya meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengaudit semua pengangkatan pegawai

yang telah dilakukan. Sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan cermat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memperhatikan kapasitas fiskal daerah serta keadilan bagi tenaga kerja.

Terakhir, apa harapan Anda untuk masa depan pelayanan publik di Jawa Barat?

Harapan saya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan gubernurnya, dapat berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Harus ada perubahan signifikan dalam pengelolaan tenaga kerja di sektor publik untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang dipekerjakan adalah yang terbaik dalam bidangnya, sehingga layanan kepada masyarakat bisa lebih optimal dan efisien.

(*)



Anggota Komite I DPD RI Aanya Rina Casmayanti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Jangan Rekrut Guru dengan *Outsourcing*



Anggota DPD RI Maria Goreti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Helena Agustina Fernandez Ojan

Penulis

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Maria Goreti menegaskan bahwa profesi guru tidak dapat disamakan dengan tenaga kerja teknis lainnya. Oleh karena itu, menurutnya tidak tepat jika kekurangan tenaga guru di daerah diatasi dengan melakukan rekrutmen dengan sistem *outsourcing*.

“Merekrut tenaga guru dengan cara *outsourcing* sama halnya dengan merendahkan martabat guru. Guru adalah profesi yang mulia. Guru bukan hanya bekerja untuk mendapatkan upah, tetapi guru mendedikasikan hidupnya untuk mendidik anak bangsa, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Senator dari Kalimantan Barat itu.

“**Merekrut tenaga guru dengan cara *outsourcing* sama halnya dengan merendahkan martabat guru. Guru adalah profesi yang mulia. Guru bukan hanya bekerja untuk mendapatkan upah, tetapi guru mendedikasikan hidupnya untuk mendidik anak bangsa, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.**”

**Anggota Komite I
DPD RI, Maria Goreti**

Penegasan itu disampaikan Maria Goreti dalam pertemuan Komite I DPD RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (20/1/2025). Persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah daerah adalah di satu

sisi memiliki keterbatasan anggaran, namun di sisi lain membutuhkan tenaga untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, muncullah wacana merekrut tenaga *outsourcing*, termasuk tenaga guru.

Menurut Maria Goreti, apa yang diberikan guru kepada bangsa ini akan berguna dalam masa yang panjang. Maka sudah seharusnya bangsa ini memberikan penghargaan kepada guru sepanjang hidupnya. Kalau guru direkrut melalui *outsourcing*, setelah kontrak selesai tidak ada penghargaan apapun atas jasa-jasanya kepada bangsa ini.

Senator asal Kalbar itu mengatakan, kebutuhan akan guru seharusnya dipenuhi oleh negara melalui formasi aparatur sipil negara (ASN). Dia mengakui bahwa saat ini pemerintah masih menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang belum terjarang pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dia meminta persoalan ini harus menjadi prioritas. Setelah itu pemerintah daerah harus mengajukan usulan kepada pemerintah pusat untuk membuka formasi penerimaan guru yang diperlukan di wilayah kerjanya masing-masing. Dengan demikian tenaga guru di lingkungan sekolah-sekolah negeri adalah ASN yang kesejahteraannya ditanggung oleh negara. (*)



DPD RI Siap Bentuk Pansus

Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan disaksikan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyerahkan cendera mata kepada Asisten III Pemerintah Kota Bandung Tono Rusdianto Hendroyono. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Muhammad Fathoni

Penulis

Ada 50 daerah di Indonesia yang memiliki data jumlah tenaga honorer atau non aparatur sipil negara (ASN) yang jauh berbeda dengan data yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara (BKN). Perbedaan angka ini menjadi salah satu penyebab kisruhnya pengangkatan tenaga non ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah.

Salah satu daerah yang mencolok perbedaan data jumlah tenaga non ASN tersebut adalah di Kota Bandung, Jawa Barat. Kota Bandung masuk dalam urutan ke-9, di mana data BKN, jumlah tenaga non ASN berjumlah 8.158 orang dengan formasi 790. Terdapat selisih sebanyak 7.366 orang. Hal ini menjadi masalah dalam seleksi PPPK di daerah tersebut.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai lembaga representasi daerah, sangat berkepentingan dengan kisruhnya seleksi PPPK yang hampir terjadi di semua daerah. “DPD RI berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan non ASN ini dan DPD RI akan mencoba menyelesaikannya sesegera mungkin. Jika diperlukan akan dibentuk pansus untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, yang menyertai kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Bandung, Senin (20/1/2025).

Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan dalam pertemuan dengan pejabat Pemerintah Kota Bandung yang terkait tersebut menegaskan bahwa dalam proses alih status pegawai non ASN menjadi PPPK harus segera diselesaikan. “Karena itu kami dari Komite I melakukan kunjungan kerja ke sini untuk menyerap aspirasi persoalan alih

status pegawai non ASN yang terjadi,” kata Andi.

Andi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat Komite I dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa hari lalu, ada 50 daerah yang bermasalah pada pendataan non ASN di Indonesia, salah satunya Kota Bandung. Kota Bandung masuk dalam 50 daftar tersebut. Belum lagi masalah anggaran daerah yang akan terbebani. Persoalan tersebut perlu segera diselesaikan.

Padahal, pengangkatan pegawai non ASN tersebut paling lambat bulan Desember 2024, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selesai itu, daerah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau dengan sebutan nama lainnya. “Jadi persoalan ini harus segera diselesaikan,” kata Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur itu. (*)

Proses Seleksi PPPK Jangan Jadi Bola Panas



Anggota DPD RI Sudirman. (Foto Biro PHM Setjen DPD R)

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sudirman atau Haji Uma, menyoroti polemik yang terus berlanjut terkait seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Proses seleksi PPPK yang tidak kunjung memberikan kepastian telah menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat, khususnya bagi pegawai honorer yang telah melewati batas usia maksimal.

“Polemik ini sangat kita sayangkan. Banyak yang merasa seolah dipermainkan karena tidak ada kejelasan penerimaan, meskipun mereka telah memenuhi kualifikasi. Proses ini jangan sampai menjadi bola panas yang terus bergulir tanpa penyelesaian. Kita harus memastikan bahwa semua pihak yang memenuhi kriteria mendapatkan kesempatan

“**Polemik ini sangat kita sayangkan. Banyak yang merasa seolah dipermainkan karena tidak ada kejelasan penerimaan, meskipun mereka telah memenuhi kualifikasi. Proses ini jangan sampai menjadi bola panas yang terus bergulir tanpa penyelesaian. Kita harus memastikan bahwa semua pihak yang memenuhi kriteria mendapatkan kesempatan yang adil.**”

**Anggota Komite I
DPD RI, Sudirman**

yang adil,” tegas Haji Uma, baru-baru ini.

Senator dari Aceh itu menyatakan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN), agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan aspirasi dari daerah yang mengeluhkan ketidakadilan dalam proses seleksi PPPK di daerah.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi berharap semua pegawai non ASN di daerah dapat diangkat menjadi PPPK. Sesuai dengan komitmen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang akan mengangkat semua pegawai non ASN, walaupun ada yang paruh waktu.

Mengenai adanya pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi yang beralasan bahwa formasi PPPK tidak sebesar yang disediakan pemerintah pusat, dia meminta mereka segera mengusulkan. “Kalau pemda sekarang belum mengajukan formasi sejumlah dibutuhkan bagi mereka diterima paruh waktu, secepatnya memanfaatkan itu, karena non ASN sudah tidak diperbolehkan lagi,” kata Ketua PGRI Jawa Tengah itu.

Ke depan, dia mengajak untuk bersama-sama memperjuangkan alokasi belanja daerah dimaksimalkan untuk ASN, termasuk PPPK. Alokasi belanja daerah untuk ASN tidak hanya 30 persen dari APBD, tetapi lebih. Bagaimana pola pembagian alokasi keuangan pusat dan daerah bisa menguntungkan dan mempermudah daerah mengelola daerah dengan baik. (*)

Utamakan Nakes dan Guru untuk Diangkat Jadi PPPK

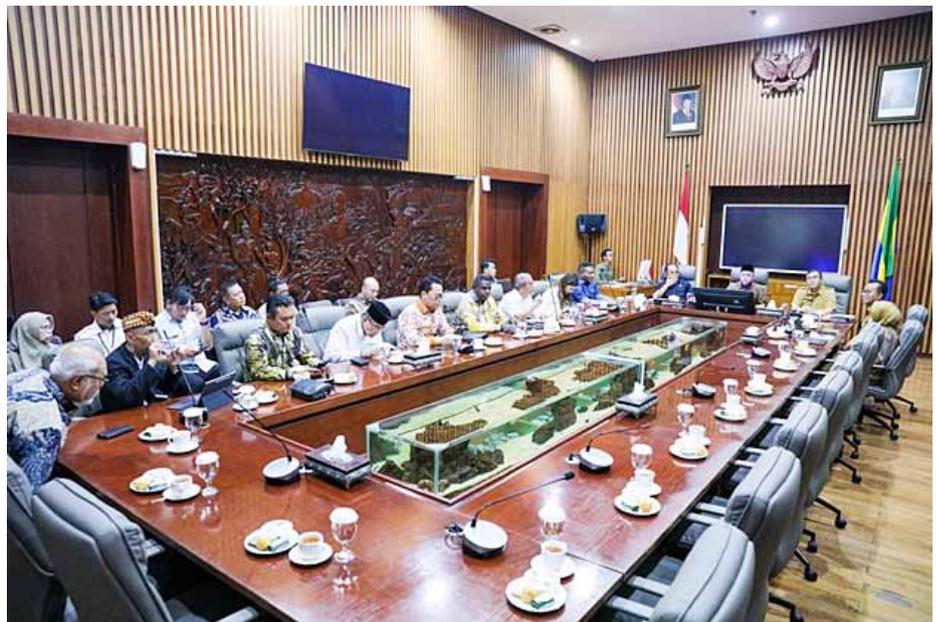
Didin Saputra

Penulis

Membludaknya jumlah tenaga honorer atau pegawai non aparatur sipil negara (ASN) di daerah, anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menghimbau pemerintah daerah untuk mengutamakan tenaga kesehatan (nakes) dan guru dalam proses alih status pegawai non ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal tersebut disuarakan para anggota Komite I DPD RI dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (20/1/2025). Dipilihnya Kota Bandung dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI tersebut, karena tingginya jumlah pegawai non ASN yang tidak bisa diangkat menjadi PPPK.

Dalam kunjungan kerja yang disertai Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung itu, berlangsung dalam rangka pengawasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khusus dalam proses alih status pegawai non ASN menjadi PPPK, yang seharusnya sudah berakhir pada Desember 2024.



Suasana pertemuan Komite I DPD RI dengan Pemerintah Kota Bandung. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Tujuan kunjungan kerja Komite I DPD RI ke sini untuk menyerap aspirasi persoalan alih status pegawai non ASN yang terjadi di Kota Bandung. Berdasarkan hasil rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa waktu lalu, ada 50 daerah yang bermasalah pada pendataan non ASN-nya dan Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, masuk dalam 50 daftar tersebut, ini perlu segera diselesaikan,” kata Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan.

Dalam pertemuan tersebut, Asisten III Pemerintah Kota Bandung Tono Rusdianto Hendroyono memaparkan kondisi pegawai non ASN di Pemerintah Kota Bandung. Dijelaskannya,

berbagai upaya pendataan non ASN telah dilakukan Pemkot Bandung sesuai dengan regulasi yang ada dan konsekuensi dari itu adanya beban anggaran daerah. Saat ini di Pemkot Bandung terdapat sebanyak 8.156 non ASN.

Pemkot Bandung telah melaksanakan langkah teknis sejak 2022, antara lain melaksanakan asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025. Khusus untuk tenaga kependidikan dan kesehatan akan diarahkan untuk PPPK paruh waktu. Tenaga Puskesmas yang bersifat urgen dengan skema tenaga ahli dan untuk tenaga guru dengan skema tenaga ahli melalui anggaran peningkatan mutu. (*)

CITRA DPD RI MELONJAK

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

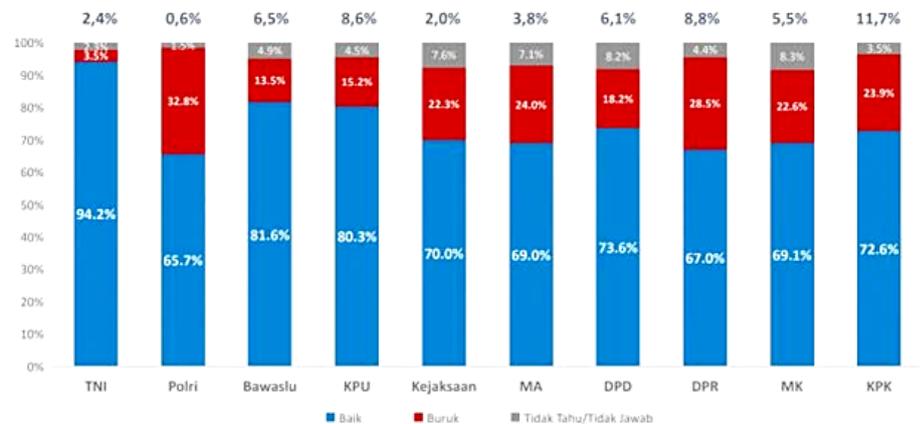
Citra dan tingkat kepuasan atau kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di bawah kepemimpinan Sultan B Najamuddin, GKR Hemas, Tamsil Linrung dan Yorrys Raweyai. Hal tersebut tercermin dari hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Jumat, 25 Januari 2025.

Hasil survei Litbang Kompas dari lembaga-lembaga yang disurvei, DPD RI menduduki peringkat keempat dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 73,6 persen. Sedangkan peringkat pertama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 94,2 persen.

Survei wawancara tatap muka pada 4-10 Januari 2025, dengan 1.000 responden secara acak di 38 provinsi Indonesia tersebut, peringkat kedua ditempati oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 81,6 persen. Posisi ketiga adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tingkat kepercayaan publik sebanyak 80,3 persen.

Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Citra Lembaga (%)



Sumber Kompas (25/1/2025)



yang berada pada peringkat kelima dengan penilaian citra baik 72,6 persen.

Kejaksaan Agung pada posisi keenam berada di angka 70 persen. Kemudian di posisi ketujuh, ditempati oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tingkat kepuasan dan citra baik 69,1 persen. Berikutnya Mahkamah Agung (MA) mendapatkan 69 persen, Dua terakhir adalah DPR RI dengan tingkat kepercayaan publik 67 persen dan terbawah adalah Polri dengan tingkat percayaan publik 65,7

persen.

Berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga DPD RI naik cukup signifikan, yaitu naik 6,1 poin dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada September 2024 yang hanya mencapai 67,5 persen. Dari hasil survei itu menunjukkan bahwa hanya 18,2 persen yang menilai DPD RI buruk dan 8,2 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa DPD RI jauh meninggalkan saudara tuanya di Senayan yang sama-sama mempunyai tugas dan fungsi yang sama di bidang legislasi, yaitu DPR RI. DPR RI menempati peringkat nomor dua terakhir dari 10 lembaga yang disurvei, dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 67 persen. (*)

DPD RI harus Jadi *Front Line* Perjuangkan Aspirasi Daerah

Adhi Nugroho

Penulis

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, menilai keberhasilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam meningkatkan citranya dan mendapat kepercayaan publik tidak lepas dari peran aktif dan kerja keras para anggotanya yang mampu menyerap dan mengakomodasi aspirasi masyarakat daerah.

“Kenaikan citra yang positif ini tak lepas dari peran anggota DPD RI yang dinilai telah mewakili aspirasi masyarakat. Upaya menyerap aspirasi dari berbagai daerah serta tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh para anggota DPD RI menjadi kredit poin tersendiri yang membuat citra lembaga yang lahir pasca reformasi ini mendapat apresiasi yang besar dari rakyat,” kata Abubakar Solissa, Minggu (26/1/2024).

Solissa, yang selalu mengamati perkembangan politik nasional, menyebutkan bahwa faktor lain yang berkontribusi besar terhadap peningkatan citra DPD RI adalah kemampuan Sultan B Najamudin dalam memimpin. *Leadership* Sultan B Najamudin memainkan peran kunci dalam mem-



Anggota DPD RI periode 2024-2029 dengan ketua Sultan B Najamudin, dan wakil ketua GKR Hemas, Tamsil Linrung dan Yorrys Raweyai. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

bangun citra lembaga yang selama ini dinilai kurang optimal.

“Selain kerja-kerja anggota yang menyentuh aspirasi masyarakat paling bawah, faktor *leadership* Sultan dalam memimpin lembaga memiliki kontribusi cukup besar terhadap citra DPD RI. Sultan memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun komunikasi politik lintas institusi, baik legislatif maupun eksekutif,” akuinya.

Kemampuan Sultan dalam membangun komunikasi politik lintas institusi, legislatif maupun eksekutif, menjadi faktor tambahan bagi masyarakat dalam melihat *positioning* DPD RI yang semakin strategis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di semua tingkatan.

Ia juga memuji upaya DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan rakyat, meskipun kewenangan yang dimiliki lembaga ini terbilang terbatas dalam konteks hukum ketatanegaraan. Sebagai lembaga yang merepresentasikan langsung daerah, dia melihat peran-peran DPD RI sudah mulai membaik dibandingkan sebelumnya.

“Citra positif ini harus terus dijaga dengan menunjukkan kerja-kerja politik yang strategis dan terukur. DPD RI harus menjadi *front-line* dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan rakyat secara keseluruhan. Ini harus dilakukan secara konsisten oleh Sultan dan kawan-kawannya di DPD RI,” pungkasnya. (*)

DPD RI Siap Berkontribusi Sukseskan Program MBG

Rini Sumarni

Penulis

Isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2025 ini terus mendapat perhatian publik. Bahkan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menaruh harapan besar agar program tersebut berjalan dengan sukses. Untuk kesuksesan program tersebut, DPD RI secara kelembagaan siap berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat.

“DPD RI siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyukseskan program MBG ini di daerah,” kata Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, ketika menerima kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana, di ruangan kerja Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Sultan menjamin bahwa 152 anggota DPD RI akan siap berkontribusi dan menyukseskan program MBG sebagai mitra BGN. DPD RI sebagai lembaga representasi daerah, kata Sultan, akan berupaya melakukan pengawasan dan



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menerima kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

masukannya kepada pemerintah daerah yang terlibat dalam program MBG ini.

Sultan kepada Kepala BGN mengungkapkan rasa optimisnya bahwa jika semua pihak terkait, terutama pemerintah daerah, lembaga zakat infaq dan sedekah (ZIS), bahkan tokoh masyarakat seperti Anggota DPD RI terlibat langsung dalam program ini, maka target penyaluran program MBG akan terjadi lebih cepat sebelum akhir tahun 2025.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mendorong agar alokasi anggaran untuk program MBG perlu dilakukan dengan mekanisme yang khusus oleh pemerin-

tah. Jangan sampai proses pembiayaan program MBG terhambat.

Sultan mengapresiasi kerja keras BGN dalam menyiapkan dan memulai program MBG secara bertahap. Perhatian dan kerja keras pemerintah dan BGN harus didukung oleh semua elemen bangsa. Semua pihak harus mendukung kinerja BGN dalam program MBG. Jangan sampai terhambat dengan masalah teknis alokasi keuangan. Lebih bagus dia mengharapkan pendistribusian MBG dapat diterima secara serentak oleh semua anak sekolah sebelum akhir tahun,” harapnya. (*)

Demi Sukseskan Program MBG Komite III Raker Bersama BGN

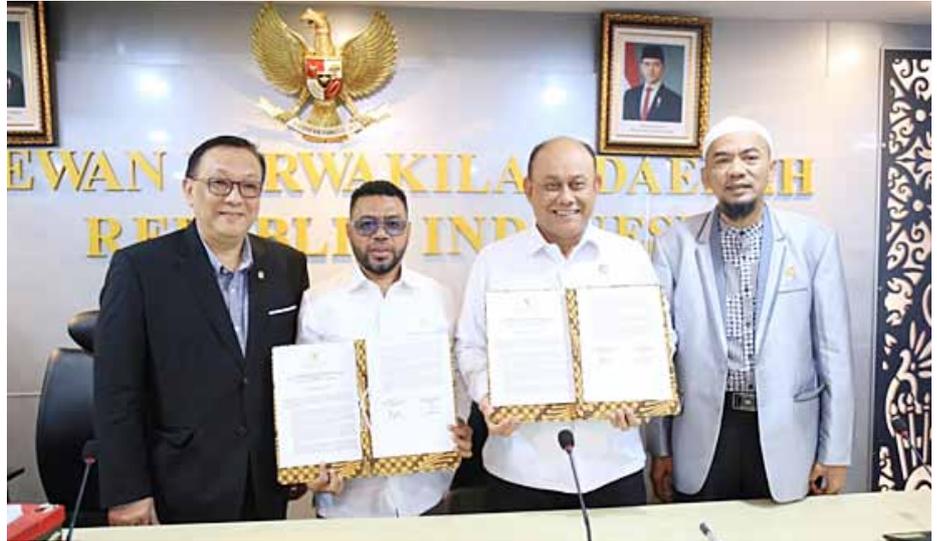
Nanda Russia Rola

Penulis

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI betul-betul menunjukkan keseriusannya dalam mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar terlaksana dengan sukses. Hal tersebut ditunjukkan oleh Komite III DPD RI dengan menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Selasa (21/1/2025).

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menekankan bahwa program MBG merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Namun, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, termasuk permasalahan teknis, kebijakan, dan pengelolaan anggaran.

“Melalui rapat kerja ini, diharapkan dapat terjalin koordinasi dan sinergi yang lebih kuat antara Komite III DPD RI dengan Badan Gizi Nasional dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia lebih baik melalui program MBG. Hasil yang dicapai dalam rapat kerja ini akan menjadi landasan penting



Ketua Komite III DPD RI Filep Mawafma dan Kepala BGN Dadan Hindayana usai menandatangani kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dalam perumusan kebijakan terhadap kebutuhan dan aspirasi daerah,” kata Filep saat memimpin rapat, didampingi Wakil Ketua Komite III DPD RI Dailami Firdaus dan Jelita Donal.

Filep menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam tata kelola makanan oleh keluarga yang meliputi kebersihan, memilih bahan makanan yang sehat, dan memasak dengan benar, juga harus menjadi tujuan program MBG. Selain itu, dirinya juga memastikan sikap dan dukungan DPD RI pada program MBG, salah satunya melalui tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi serta dalam bentuk kolaborasi dan kerjasama lainnya.

Dalam raker tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program MBG juga menyasar ibu hamil dan menyusui selain usia anak sekolah (hingga remaja), dengan jumlah total sekitar 82,9 juta orang penerima manfaat. Dalam menjalankan program ini, BGN punya tugas yang sangat berat, apalagi BGN sebagai lembaga baru yang masih kekurangan SDM dan anggaran.

“Meski menghadapi beberapa kendala, kami pastikan kinerja kami *on record*. Pada per 20 Januari 2025, dari target 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tahun 2025, BGN berhasil membangun 244 SPPG di 144 kota dan kabupaten. Sisanya sedang dalam proses,” jelas Dadan. (*)

Raker Komite III dengan BGN, Ini yang Disampaikan Para Senator

Adhi Nugroho

Penulis

Dalam rapat kerja (raker) Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025), para anggota DPD RI atau senator menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Gorontalo, Jasin U Dilo, menyoroti pentingnya memprioritaskan pelaksanaan program MBG di daerah pedalaman. “Di pedalaman banyak masyarakat yang tidak mampu, apalagi anak-anak yatim atau yatim piatu yang sangat membutuhkan makanan bergizi,” jelasnya.

Anggota DPD RI dari Maluku Utara, Hasby Yusuf, mengharapkan program MBG tetap sepenuhnya menggunakan APBN dan tidak membebani APBD. Dengan nada yang sama, anggota DPD RI dari Riau, Sewitri, berkata, “Beban anggaran di daerah sudah cukup berat. Saya harap anggaran Makan Bergizi Gratis ini tetap dari pusat, jangan di-



Para anggota Komite III DPD RI saat mengikuti rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

timpakan ke kami di daerah. Di Riau saat ini anggaran defisit dan masih ada yang tunda bayar.”

Pada kesempatan yang sama, beberapa anggota DPD RI menyoroti pentingnya pengaturan sistem distribusi yang baik untuk daerah kepulauan. Anggota DPD RI dari Kalimantan Barat, Erlinawati, mengatakan bahwa makanan dalam program MBG harus dipastikan tetap segar dan layak konsumsi ketika sampai di tangan anak-anak.

Hal senada disampaikan oleh anggota DPD RI dari Maluku, Anna Latuconsina. Dia menekankan kebutuhan dapur umum yang lebih banyak di wilayahnya, mengingat kabupaten/kota di Maluku Utara dipisahkan oleh laut. “Maluku punya sebelas kabu-

paten/kota yang dipisahkan oleh lautan, sehingga dapur umum perlu lebih banyak dibanding daerah lain. Misalnya, makanan yang dikirim dari Ambon ke Kecamatan Saparua menggunakan speedboat, apakah dijamin makanan itu bisa tiba dengan kondisi yang masih baik?” ujarnya.

Anggota DPD RI dari Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, mengapresiasi program MBG sebagai upaya memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Ia berharap agar program ini dapat segera berjalan di provinsi daerah pemilihannya. “Memang tantangan geografisnya luar biasa, kami harapkan untuk keadilan, anak-anak di Papua Pegunungan harus merasakan program ini,” harapnya.

(*)

Program MBG Jangan Beban APBD

Theresia Oktavina

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Bengkulu, Destita Khairilisani, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto pada tanggal 6 Januari 2025 diperluas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di seluruh pelosok desa.

“Masyarakat di pelosok desa sering kali kesulitan mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup dan kesehatan mereka,” ujar Destita dalam rapat kerja Komite I DPD RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, di kantor DPD RI, Selasa (21/1/2025).

Senator Destita menekankan bahwa program MBG ini harus sepenuhnya menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jangan sampai pelaksanaan program MBG membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat keterbatasan APBD di banyak daerah.

Untuk menutupi kekurangan anggaran dalam program MBG, Destita lebih cenderung mengusulkan penggunaan dana dari pihak



Anggota DPD RI Destita Khairilisani bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Masyarakat di pelosok desa sering kali kesulitan mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup dan kesehatan mereka.”

Anggota DPD RI,
Destita Khairilisani

swasta. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melibatkan mitra strategis seperti perusahaan melalui program *corporate social responsibility* (CSR) agar pembiayaan program dapat lebih

optimal.

Ita juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar implementasi program MBG berjalan maksimal. Selain itu, Destita meminta agar BGN memberikan informasi yang lebih transparan terkait mekanisme kerja sama dengan mitra.

“BGN harus lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait proses dan persyaratan pendaftaran sebagai mitra. Meskipun sudah ada video panduan, masyarakat masih sering menghadapi kebingungan dalam pelaksanaannya,” tegas Destita. (*)

Libatkan Kepala Daerah Dalam Program MBG



Anggota DPD RI Rai Mantra. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Betria Eriani

Penulis

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Provinsi Bali, Rai Mantra, merekomendasikan agar kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) turut dilibatkan dalam tim kerja daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam menjaga ketersediaan/pasokan pangan, fiskal moneter daerah, serta pengelolaan limbah.

“Juga kemungkinan dalam pengendalian inflasi, mitigasi pelaksanaan program serta pengawasan lainnya,” kata Rai Mantra dalam rapat

kerja Komite III DPD RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Mantan Wali Kota Denpasar ini berpendapat bahwa pelaksanaan program MBG akan jauh lebih efektif dan efisien serta bermanfaat ketika dilaksanakan secara kolaboratif. Untuk itu, sosialisasi kemitraan perlu ditingkatkan, sehingga dapat menjangkau lebih luas mitra-mitra pelaksana di daerah.

Rai Mantra juga mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk menjadi mitra pelaksana program MBG. “Nantinya dalam permodalan

dapat bekerja sama dengan lembaga perkreditan desa (LPD). Kemitraan seperti ini akan menumbuhkan peluang bagi pertumbuhan moneter di desa,” jelas Rai Mantra.

Rai Mantra mengatakan program ini sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, dia mengharapkan program MBG bisa berjalan dengan baik.

“Dari raker ini saya berharap dapat terjalin koordinasi dan sinergi yang lebih kuat antara Komite III dengan Badan Gizi Nasional dalam upaya meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih baik ke depannya,” ujar Rai Mantra. (*)

Provinsi Papua Pegunungan Menantikan Program MBG

Didin Saputra

Penulis

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, mengharapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pada tanggal 6 Januari 2025 dapat segera terlaksana di provinsi yang menjadi daerah pemilihannya itu.

“Kami mengharapkan program Makan Bergizi Gratis ini segera dilaksanakan di Papua Pegunungan,” kata Arianto Kogoya dalam rapat kerja Komite III DPD RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dia mengakui bahwa implementasi program MBG di Papua Pegunungan dihadapkan pada tantangan yang besar, seperti kondisi geografis yang berpotensi menyebabkan kendala dalam distribusi makanan. Namun, demi memenuhi prinsip keadilan agar anak-anak sekolah di Papua Pegunungan juga dapat merasakan manfaat program MBG, dia berharap pemerintah dapat segera mencari solusi untuk percepatan pelaksanaan program tersebut.



Anggota DPD RI Arianto Kogoya bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Kami mengharapkan program Makan Bergizi Gratis ini segera dilaksanakan di Papua Pegunungan.**”

**Anggota Komite III,
Arianto Kogoya**

Arianto pun menyampaikan apresiasi atas program yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, program MBG penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, melalui generasi muda yang memiliki gizi baik. “Kami sampaikan apresiasi tinggi atas program Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ini. Ini kami lihat sebagai maksud yang mulia supaya

generasi di 2045 berbeda,” kata dia.

Arianto merasa optimis bahwa program MBG akan berhasil di Provinsi Papua Pegunungan. Sebagai contoh, Kabupaten Tolikara di provinsi tersebut telah melaksanakan program serupa, seperti 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk ibu hamil dan balita sejak 2014-2024, serta program Sarapan Sehat Anak Sekolah (SARASEHAN) yang telah berjalan sejak 2023 hingga saat ini.

“Program SARASEHAN di Tolikara yang telah berjalan selama ini menjadi contoh dan rujukan bagi Provinsi Papua Pegunungan untuk melaksanakan program MBG. Sekali lagi kami harapkan, program MBG ini segera diwujudkan di delapan kabupaten se-Papua Pegunungan,” ujar senator dari Papua Pegunungan itu. (*)

Untuk Sukseskan MBG: Komite III Minta Masukan Pakar



Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI bersama pakar usai RDPU membahas program MBG. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Dalam upaya menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengundang sejumlah pakar dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diadakan pada Senin (20/1/2025). Rapat ini bertujuan untuk meminta masukan dan pandangan dari para pakar berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, bersama Wakil Ketua Dailami Firdaus, Jelita Donald, dan Erni Daryanti, menghadirkan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Ahmad Syafiq, Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi

Indonesia (PERSAGI), Doddy Izwardy, dan Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Zaikul Fikri.

Ahmad Syafiq menilai bahwa program MBG memiliki dampak positif terhadap peningkatan status gizi, ketahanan pangan, dan pembangunan manusia. Namun, ia menekankan pentingnya penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan gizi tiap kelompok umur serta perlunya standardisasi dan evaluasi berkala.

“Dampak dari program yang masif ini tentu sangat besar, sehingga perlu segera dieksekusi. Secara filosofis, program ini juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan berhasil menunjukkan bahwa negara hadir dalam salah satu masalah besar nasional, yaitu masalah gizi,” ujar

Ahmad Syafiq.

Doddy Izwardy, dari PERSAGI, menyebut program MBG sebagai langkah strategis untuk menekan angka stunting. “Studi menunjukkan bahwa intervensi makanan bergizi secara konsisten dapat menurunkan angka stunting hingga 32 persen. Pengawasan terhadap kualitas dan kecukupan gizi makanan menjadi krusial dalam memastikan efektivitas program ini,” kata Doddy.

Zaikul Fikri dari CELIOS, menyatakan bahwa lebih dari 50 persen keluarga di Indonesia menghadapi kerentanan pangan. “Program MBG merupakan langkah sangat strategis dan perlu didukung. Program ini harus dimitigasi dari berbagai risiko, termasuk potensi kerugian hingga Rp8,6 triliun jika penyaluran dilakukan secara sentralistik,” ujar Zaikul. (*)



Dapur Program MBG Perlu Menyasar Daerah Terpencil

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Rifki Farabi, menekankan pentingnya lokasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berada dekat dengan sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Menurutnya, lokasi dapur yang terlalu jauh dari sekolah di daerah terpencil, seperti yang terjadi di beberapa pulau di NTB, menyulitkan distribusi makanan.

Di provinsi NTB, banyak daerah terpencil yang berada di pulau-pulau, seperti Pulau Moyo di Sumbawa dan Pulau Maringkik di Kabupaten Lombok Timur. “Jika dapur makan bergizi gratis jauh dari pulau atau terletak di daratan utama, tentu itu akan sangat menyulitkan. Apalagi di daerah kepulauan ini, akses transportasi menggunakan kendaraan roda empat sangat terbatas,” ujar Farabi.

Oleh karena itu, Farabi mengusulkan agar pemilihan lokasi untuk dapur MBG harus menjadi per-

“**Jika dapur makan bergizi gratis jauh dari pulau atau terletak di daratan utama, tentu itu akan sangat menyulitkan. Apalagi di daerah kepulauan ini, akses transportasi menggunakan kendaraan roda empat sangat terbatas.**”

**Anggota DPD RI,
Muhammad
Rifki Farabi**

hatian semua pihak, agar distribusi makanan dapat dilakukan tepat waktu. “Salah satu hal penting dalam berjalannya program MBG ini adalah aksesibilitas dapur ke titik penerima manfaat,” tambahnya.

Farabi juga menyoroti adanya wilayah terpencil

di Pulau Sumbawa yang berada di perbukitan dan sulit dijangkau, seperti Baturatok dan Tepal. Ketepatan waktu dalam pendistribusian makanan bergizi menjadi sangat krusial di wilayah-wilayah seperti ini.

Usulan ini telah disampaikan Farabi dalam rapat kerja Komite III DPD RI dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Selasa (21/1/2025). “Mudah-mudahan program makanan bergizi gratis ini mempunyai implikasi panjang dalam meningkatkan kualitas siswa-siswi Indonesia,” tutup Farabi. (*)



Anggota DPD RI Muhammad Rifki Farabi (Foto Istimewa)

Urgensi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Asta Cita



Wakil Ketua DPD RI GKR Emas, ketika membuka *executive brief* dengan tema 'Otonomi Daerah Dalam Perspektif Asta Cita'. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Theresia Oktavina

Penulis

Indonesia tengah bersiap menuju visi “Indonesia Emas 2045” dengan persiapan yang matang melalui perancangan UU Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam rangka ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memainkan peran kunci sebagai representasi daerah dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional, berusaha menjembatani antara aspirasi daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

Sebagai upaya untuk mem-

perkuat sinergi tersebut, DPD RI mengadakan *executive brief* dengan tema ‘Otonomi Daerah Dalam Perspektif Asta Cita’. Acara ini diadakan di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, pada hari Rabu, 22 Januari 2025. Forum ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan telaah kritis dari berbagai pihak mengenai penyelenggaraan otonomi daerah.

Wakil Ketua DPD RI GKR Emas, dalam sambutannya menekankan bahwa forum ini adalah bagian dari usaha untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah. GKR Emas menjelaskan bahwa dalam kerangka RPJPN, otonomi daerah diharapkan

dapat menjadi instrumen vital dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Otonomi daerah, menurut GKR Emas, memiliki tiga peran strategis dalam pembangunan nasional. *Pertama*, sebagai instrumen pemerataan pembangunan yang memungkinkan setiap daerah untuk mengembangkan potensi unggulannya, baik itu sumber daya alam, budaya, maupun ekonomi kreatif. Ini diharapkan bisa mempercepat pengurangan kesenjangan antar wilayah.

Kedua, otonomi daerah berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih dekat, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Peran *ketiga* dan tidak kalah penting, otonomi daerah sebagai pilar demokrasi lokal. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan, yang merupakan aspek fundamental dalam prinsip demokrasi. Melalui forum ini, DPD RI berupaya memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung otonomi daerah. (*)



Pemekaran Daerah Sesuai Konstitusional



Suasana *executive brief* dengan tema 'Otonomi Daerah Dalam Perspektif Asta Cita', di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (22/1/2025). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Betria Eriani

Penulis

Dalam upaya respons berbagai aspirasi dari daerah, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Andi Sofyan Hasdam mengungkapkan, ada keinginan kuat di tingkat lokal untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan melalui pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Hingga saat ini, tercatat sebanyak 186 calon DOB yang telah diajukan meliputi 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 23 kota. Keinginan untuk pemekaran ini, menurut Andi Sofyan, adalah langkah konstitusional yang berakar dari kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada DPD RI.

“Pemekaran daerah merupakan langkah konstitusional dan pelaksanaan dari mandat UUD 1945.”

**Ketua Komite I DPD RI
Andi Sofyan Hasdam**

“Pemekaran daerah merupakan langkah konstitusional dan pelaksanaan dari mandat UUD 1945,” ujar Andi Sofyan dalam sebuah *brief eksekutif* dengan tema ‘Otonomi Daerah Dalam Perspektif Asta Cita’ yang diselenggarakan di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, pada hari Rabu (22/01/2025).

Dalam acara yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan termasuk Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenko Polhukam Bidang Politik dan Keamanan Ade Pratikno, serta pakar otonomi daerah Ajiep Padindang, bertujuan untuk memperkuat sinergi antara DPD RI dan pemerintah dalam mewujudkan visi otonomi daerah sesuai dengan konstitusi.

Ajiep Padindang, seorang pakar dalam bidang ini, menambahkan pentingnya revisi UU Pemerintahan Daerah (Pemda) untuk memperluas otonomi daerah. “Perlu adanya penegasan kembali pada prinsip desentralisasi, tugas pembantuan, serta pembagian kewenangan dan urusan guna memperkuat ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

Padindang, yang juga mantan anggota DPD RI, menyatakan kekhawatirannya terhadap isu sentralisasi yang dapat menguat di masa depan. “Jika tidak segera diambil tindakan, isu sentralisasi bisa semakin dominan, merugikan usaha kita menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. Ini merupakan refleksi dari kebutuhan mendesak untuk menyusun Desain Besar Otonomi Daerah yang komprehensif sebagai bagian dari visi jangka panjang negara. (*)

Pemekaran Daerah tak Bisa Dihindari

Helena Agustina FO

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abraham Liyanto, menyoroti pentingnya pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk dan kebutuhan infrastruktur yang meningkat di berbagai daerah. Menurutnya, proses ini adalah suatu keharusan yang tidak bisa dihindari dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam sebuah wawancara terkini, Liyanto, yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, menanggapi stigma negatif yang seringkali melekat pada pemekaran wilayah. Banyak yang menganggap bahwa pemekaran hanya menambah beban keuangan negara. Namun, dia menegaskan bahwa pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. “Tidak semua pemekaran menghasilkan efek negatif. Bukti, beberapa DOB baru telah berhasil berkembang dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Senator ini juga mencatat bahwa di daerah pemilihannya, NTT, terdapat proposal untuk 10 DOB baru, yang menurutnya sangat diperlukan. Oleh karena itu, Liyanto



Anggota DPD RI Abraham Liyanto. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

mendesak pemerintah untuk mengakhiri kebijakan moratorium pemekaran daerah yang telah berlaku sejak tahun 2014, dikarenakan alasan keterbatasan anggaran. “Sudah satu dekade kebijakan ini diterapkan, dan itu sudah terlalu lama. Kita perlu memberikan ruang untuk aspirasi daerah yang ingin maju,” katanya.

Abraham menambahkan bahwa dalam pelaksanaan pemekaran, harus ada prioritas yang jelas. Ia menyarankan agar pemekaran difokuskan terlebih dahulu pada wilayah perbatasan, seperti Provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, karena wilayah tersebut memiliki kebutuhan khusus dalam hal keamanan dan pembangunan.

Selain itu, daerah yang

sering mengalami konflik juga perlu mendapatkan prioritas dalam pemekaran, contohnya seperti yang telah dilakukan di Papua. Daerah dengan populasi besar yang terus bertumbuh, seperti Jawa Barat, juga menjadi kandidat yang ideal untuk pemekaran agar pelayanan publik bisa lebih optimal.

Liyanto berharap bahwa pemekaran dapat dilakukan secara bertahap. “Sebaiknya kita mulai dengan sepuluh wilayah dalam setahun, kemudian dilanjutkan di tahun berikutnya, dan seterusnya, sampai semua usulan dapat direalisasikan,” tutupnya dengan penuh harapan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat membawa kemajuan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. (*)



Ketua Parlemen Singapura Berkunjung ke DPD RI



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima kunjungan Ketua Parlemen Singapura H.E. Seah Kian Peng. (Foto Berita Nasional)

Arso Pranoto Nugroho

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin, menyambut kedatangan Ketua Parlemen Singapura H.E. Seah Kian Peng dalam sebuah pertemuan di Ruang Delegasi Lantai 8, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kegiatan ini, yang berlangsung pada Jumat (24/01/2025), merupakan simbol dari komitmen bersama kedua negara untuk memperkuat hubungan antar parlemen yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas regional di ASEAN.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Parlemen Singapura didampingi oleh Duta Besar

Singapura untuk Indonesia H.E. Kwok Fook Seng, sementara Sultan Baktiar Najamudin ditemani oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan beberapa pimpinan dari komite serta Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI. Acara tersebut menjadi ajang penting untuk membahas berbagai aspek kerja sama bilateral, terutama yang berkaitan dengan investasi dan pengembangan ekonomi.

Sultan Baktiar Najamudin dalam sambutannya menekankan pentingnya hubungan Indonesia-Singapura yang telah berjalan dengan baik, berkat kontribusi signifikan Singapura dalam perekonomian Indonesia. Sultan mengungkapkan bahwa Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, dengan menyumbang sekitar 30

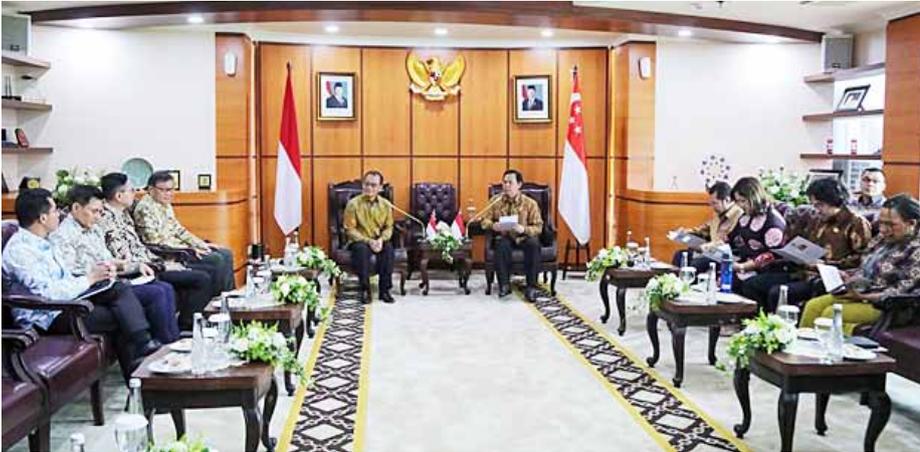
persen dari total investasi asing. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Singapura sebagai mitra strategis Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan juga menyampaikan pentingnya kerja sama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu dengan pertumbuhan sebesar 8 persen. "Indonesia akan mengundang lebih banyak *Foreign Direct Investment (FDI)*, termasuk dari Singapura, untuk berinvestasi di berbagai daerah yang meliputi 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia," kata Sultan.

Sebagai tanggapan, Ketua Parlemen Singapura, Seah Kian Peng, menggarisbawahi pentingnya kerja sama yang erat antara kedua negara dan menyoroti peluang besar yang ada dalam kerja sama sektor teknologi, energi, dan kesehatan. Seah menegaskan bahwa Singapura sangat antusias dalam memperluas investasinya di Indonesia, sebuah sinyal positif bagi peningkatan kolaborasi kedepannya.

Pertemuan ini tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura, tetapi juga membuka peluang baru untuk kerja sama yang lebih luas yang akan mendukung stabilitas dan kemakmuran bersama di kawasan ASEAN. Ini merupakan langkah maju dalam diplomasi ekonomi regional yang berkesinambungan. (*)

Penting Peran Parlemen Jaga Stabilitas di Kawasan ASEAN



Saat pertemuan antara Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dengan Ketua Parlemen Singapura H.E. Seah Kian Peng, Jumat (24/1/2025). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Arso P Nugroho

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin, menekankan peran vital parlemen dari negara-negara ASEAN dalam menjaga stabilitas regional dan mendukung pembangunan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global saat ini. Sultan menyatakan hal ini saat menerima kunjungan dari Ketua Parlemen Singapura, H.E. Seah Kian Peng, yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (24/01/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Sultan menggarisbawahi kebutuhan untuk memperkuat kerja sama tidak hanya pada level pemerintahan (*government-to-government, G2G*) tetapi juga antar parlemen (*parliament-to-parliament,*

P2P) dan bahkan melibatkan interaksi masyarakat (*people-to-people*). “ASEAN yang kuat tidak selalu disukai oleh semua pihak, sehingga kita perlu lebih proaktif dalam memperlancar kerja sama di semua level ini,” ujar Sultan.

Sultan juga menyampaikan harapannya agar Singapura dapat memainkan peran signifikan dalam membangun kawasan, termasuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, melalui investasi yang berfokus pada infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Ketua Parlemen Singapura Seah Kian Peng, mengungkapkan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh

DPD RI. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang sudah terjalin baik, mencerminkan melalui konektivitas dan aksesibilitas yang sudah sangat baik saat ini. “Fondasi yang kuat ini harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang,” kata Seah.

Lebih lanjut, Seah menyoroti perlunya peningkatan pertukaran delegasi dan sumber daya manusia antara kedua negara. “Kerja sama bisa dipercepat dengan pertukaran delegasi dan pengetahuan. Singapura siap menyambut lebih banyak delegasi dari Indonesia dan memfasilitasi pertemuan dengan mitra-mitra yang relevan untuk membahas potensi kerja sama,” tambahnya.

Salah satu bidang kerja sama yang menjadi fokus dalam pertemuan ini adalah pengembangan energi, terutama energi terbarukan, di mana Indonesia sedang berupaya mengembangkan sektor ini sementara Singapura sudah memiliki keahlian yang mendalam. Kerja sama dalam bidang ini diharapkan dapat memberikan manfaat mutualistik, mengingat kebutuhan Indonesia akan inovasi teknologi dan pengalaman Singapura yang bisa berkontribusi dalam upaya tersebut. (*)

Senator Kecam Penembakan WNI di Perairan Malaysia

M Fathoni

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam suara yang tegas mengecam insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada 24 Januari 2025. Insiden tragis ini mengakibatkan seorang warga negara Indonesia (WNI) meninggal dan empat lainnya terluka.

Senator dari Sumatera Utara Pdt. Penrad Siagian, menyerukan Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik yang tegas dalam mengusut kasus ini. “Pemerintah harus bertindak tegas dalam menyelidiki insiden ini menggunakan jalur diplomatik, sebagai bagian dari kewajiban negara dalam melindungi warganya,” ujar Penrad dalam pernyataannya yang dikeluarkan pada Selasa (28/1/2025).

Perlindungan bagi warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran yang memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara, menurut Penrad, harus menjadi prioritas. “Perlindungan terhadap pekerja migran bukan hanya kewajiban moral tetapi



Anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian. (Foto/dok pribadi)

juga legal yang harus diutamakan oleh negara,” tambahnya dengan nada serius.

Penrad juga menekankan pentingnya penegakan regulasi bagi agen perekrut tenaga kerja yang sering kali mengirim pekerja ke luar negeri tanpa dokumen lengkap. “Kami perlu memastikan bahwa semua agen tenaga kerja diawasi secara ketat dan aturan yang ada ditegakkan guna menghindari kejadian serupa di masa depan,” jelas Penrad.

Disamping itu, senator tersebut mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai jumlah besar pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri. Menurut data dari World Bank tahun 2017, terdapat sembilan juta WNI yang bekerja di luar negeri,

sementara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) hanya mencatat sekitar 3,6 juta sebagai pekerja migran resmi.

Kesenjangan data tersebut menurut Penrad, mencerminkan banyaknya WNI yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan situasi lain yang memperburuk kondisi pekerja migran. “Kasus tragis di Malaysia ini seharusnya menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk membenahi tata kelola perlindungan pekerja migran secara menyeluruh,” tegas Penrad. Ini menunjukkan urgensi dan pentingnya upaya bersama dalam memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di kancah internasional. (*)

BP2MI Diminta Serius Tangani Penembakan PMI di Malaysia

Mas Aryo Kritiyanto

Penulis

Sewitri, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Riau, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya Basri (54), warga negara Indonesia (WNI) asal Riau yang menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Insiden tragis tersebut terjadi di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat, 24 Januari 2025.

Menurut Sewitri, kejadian ini sangat miris karena terdapat penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh APMM, yang mengakibatkan kehilangan nyawa warga di daerah pemilihannya. Dalam keterangannya kepada media pada Kamis (30/1/2025), Sewitri meminta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengambil sikap tegas dan menangani masalah ini dengan serius.

Diketahui, insiden itu melibatkan lima WNI yang diduga sebagai pekerja migran nonprosedural. Mereka sedang melintas di perairan Tanjung Rhu ketika ditemukan oleh petugas patroli



Anggota DPD RI Sewitri (Foto Facebook)

APMM pada dini hari. Usai kejar-mengejar dan bertabrakan sebanyak empat kali, APMM akhirnya melepaskan tembakan ke arah kapal yang ditumpangi oleh para WNI tersebut.

Menurut APMM, tembakan dilepaskan setelah ada upaya perlawanan dari kapal WNI. Namun, saksi di kapal menyatakan bahwa tidak ada perlawanan dan mereka tidak membawa senjata apapun. Akibat dari kejadian ini, Basri tewas, satu orang kritis memerlukan operasi, dan tiga lainnya mengalami luka-luka.

Sewitri menekankan

pentingnya penyelesaian kasus ini dengan serius untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. “Kami berharap kejadian ini benar-benar ditangani serius, sehingga tidak ada korban jiwa dalam kasus serupa kedepannya,” ujarnya.

Selain itu, Sewitri juga mengharapkan adanya koordinasi yang baik antara aparat keamanan untuk menyelesaikan kasus ini. Tindakan konkret tersebut diharapkan dapat menghindari insiden serupa dan memperkuat perlindungan terhadap WNI di luar negeri. (*)



Sultan Sambut Baik Usulan Menag Soal Pendidikan Hijau Masuk Kurikulum

Lela Sa'adiyah

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menyampaikan dukungan positif terhadap usulan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengenai inklusi pendidikan pelestarian lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Usulan ini disampaikan Menteri Agama pada acara Malam Anugerah Pendidikan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, pada Rabu (22/1/2025).

Dalam pernyataannya yang dirilis pada Kamis (23/1/2025), Sultan B Najamuddin memuji konsep ekoteologi yang diusung oleh Menteri Agama, yang mengintegrasikan pandangan keagamaan terhadap kelestarian lingkungan. “Kami percaya semua agama memiliki ajaran yang spesifik pada kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang berwawasan ekologis harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan ketahanan iklim nasional,” ujar Sultan.

Lebih lanjut, Sultan, yang juga dikenal sebagai

penulis buku “*Green Democracy*”, mengungkapkan bahwa DPD RI sedang menyusun rancangan undang-undang tentang Pengelolaan Iklim. RUU ini menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025, menyoroti pentingnya pemahaman dampak perubahan iklim bagi generasi muda.

Senator ini menekankan perlunya dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama, untuk memperkaya materi dan substansi RUU tentang Pengelolaan Iklim. “DPD RI secara kelembagaan memberikan atensi serius pada isu iklim dengan pendekatan pendidikan hijau atau *green education*. Kami sangat membutuhkan dukungan materi dan substansi RUU ini,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menggarisbawahi peran penting pendidikan dalam pelestarian lingkungan. Menag menekankan bahwa lingkungan yang sehat adalah kunci untuk keberhasilan ekonomi dan sosial negara. “Tanpa lingkungan yang sehat, capaian ekonomi dan sosial tidak akan berarti. Kita tidak mungkin bisa menjadi khalifah yang sukses mengelola bumi ini jika lingkungan rusak,” ucap Menag.

Dengan mengusung kurikulum ekoteologi, Menteri Agama berharap dapat membentuk generasi bangsa yang berkualitas, yang tidak hanya cakap dalam bidang akademik tetapi juga peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. (*)



BULD Minta Masukan APKASI Soal Pelaksanaan UU Desa

Intan Fitria Yuliani

Penulis

Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pihak Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), pakar pemerintahan desa dan Pengurus Pusat Desa Bersatu, Rabu (22/1/2025).

Dalam RDPU tersebut, BULD DPD RI meminta masukan tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa yang selama dua dekade terakhir ini mengalami reduksi dan distorsi. Tidak terjadi koherensi dan konsistensi, sehingga berdampak kontradiksi. Selain itu juga mengevaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) yang mengatur tata kelola pemerintahan desa sebagai turunan UU Desa dalam rangka harmonisasi regulasi pusat-daerah.

“Kami akan menindaklanjuti semua aspirasi dan kendala di lapangan terkait tata kelola pemerintahan desa. Segala aspirasi yang kami serap terkait tata kelola pemerintahan desa ini, termasuk termasuk hasil RDPU ini akan kami tampung dan kami bahas bersama dengan kementerian terkait,” kata Ketua BULD



Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N. Liow bersama Wakil Ketua BULD DPD RI Abdul Hamid saat memimpin RDPU dengan APKASI dan pakar desa. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

DPD RI Stefanus BAN Liow.

Sejumlah anggota BULD DPD RI juga memberikan tanggapan dalam rapat tersebut, seperti Abraham Liyanto (senator asal Nusa Tenggara Timur), Yance Samonsabra (senator asal Papua Barat), Mirah Midadan Fahmid (senator asal Nusa Tenggara Barat), Yashinta Sekarwangi Mega (senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta), Ratu Tenny Leriva (senator asal Sumatera Selatan), Syarif Mbuinga (senator asal Gorontalo), dan Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik (senator asal Bali).

Yance Samonsabra misalnya, lebih menyoroti pengelolaan dana desa yang dinilai kurang transparan dan akuntabel. Padahal, kata senator dari daerah pemilihan Papua Barat itu, dulu

ketika dana desa masih kecil tapi terbukti terlihat manfaatnya di lapangan. Namun sekarang dengan dana desa yang besar tetapi tidak ada buktinya di lapangan.

Sedangkan Senator Mirah Midadan Fahmid mendorong penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar terjadi checks and balances tata kelola pemerintahan desa. Senator Syarif Mbuinga menegaskan bahwa desa harus dimajukan dan tidak perlu mencari-cari kesalahan. “Desa jangan dijadikan obyek. Kalau mencari kesalahan, pasti akan ketemu. Berganti rezim, topik yang sama terbawa terus,” tegas anggota DPD RI dari daerah pemilihan Gorontalo itu. (*)



Pilkades Perlu Disamakan dengan Regulasi Pilkada



Anggota BULD DPD RI saat RDPU dengan APKASI dan pakar pemerintahan desa. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Arso P Nugroho

Penulis

Wakil Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD)

Dewan Perwakilan (DPD) RI Abdul Hamid mengharapkan agar semua peraturan daerah (perda), termasuk yang mengatur tentang pemerintahan desa dapat sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu berupa undang-undang.

“Begitupula sebaliknya, regulasi yang ditetapkan pusat juga harus mengakomodir kepentingan daerah,” kata anggota DPD RI dari daerah pemilihan Riau itu, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) BULD dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), pakar pemerintahan desa dan Pengurus Pusat Desa Bersatu, Rabu (22/1/2025).

Sedangkan senator dari Lampung Ahmad Bastian mengusulkan pemilihan

kepala desa (pilkades) disamakan regulasinya dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Alasannya untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan profesional. “Sebaiknya pemilihan kepala desa diselenggarakan oleh lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu dan pilkada. Kalau bisa waktunya juga disamakan,” kata Bastian.

Sedangkan anggota DPD RI asal Papua Barat Yance Samonsabra mengatakan bahwa diperlukan sistem peringkat penilaian kinerja desa agar desa yang berhasil menjalankan suatu program yang diberikan dapat diberikan dana untuk program selanjutnya. Selama ini tidak pernah diberlakukan sanksi terhadap desa yang menggunakan dana desa yang tidak menjalankan programnya.

Senada dengan Yance, Ratu Tenny Leriva menyerukan perlunya dilakukan eva-

luasi ketat terhadap program-program dana desa, termasuk bimbingan teknis (bimtek) yang telah banyak diberikan agar semua target yang diberikan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan baik di desa. “Program kerja termasuk pelatihan yang diberikan harus di evaluasi apakah hasil Bimtek tersebut dijalankan dengan baik”, seru Senator asal Sumatera Selatan itu.

Pakar Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Sutoro Eko Yunanto menyebutkan bahwa permasalahan pada tata kelola pemerintahan desa terletak pada perbedaan visi misi dan minimnya apresiasi serta kesejahteraan kepala desa dan perangkatnya. “Apabila diadakan perbaikan hak penghargaan kinerja, tentunya membuat setiap kepala desa dan perangkatnya termotivasi menjalankan program dengan baik,” jelasnya. (*)

UU Desa Mengalami Reduksi dan Distorsi



Pimpinan dan anggota BULD DPD RI bersama pengurus APKASI dan pakar pemerintahan desa usai rapat dengar pendapat umum. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Didin Saputra

Penulis

Pakar pemerintahan desa dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Sutoro Eko Yunanto menilai pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa selama dua dekade terakhir ini mengalami reduksi dan distorsi, dan tidak terjadi koherensi. Alasannya karena UU Desa hanya dimaknai sebagai dana desa.

“Dalam UU Desa, hanya satu hal dijalankan murni dan konsekuen, yaitu pemilihan kepala daerah. Sisanya amburadul. Pejabat desa cinta uang, bukan rakyat. Dana Desa menjadi program yang ditentukan dan ditarget Jakarta. Kematian UU Desa di situ. Suara pemangku desa membahana di Senayan tapi tidak direspon baik,” kata Sutoro dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan

Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu (22/1/2025).

Selain itu menurut dia, UU Desa menggunakan asas rekognisi tetapi dilaksanakan dengan asas desentralisasi. Terlalu banyak delegasi pengaturan dalam peraturan daerah dan peraturan bupati yang justru menghilangkan semangat pengakuan terhadap desa. Terjadi jungkir balik. UU Desa diatur peraturan pemerintah, peraturan pemerintah diatur peraturan menteri, peraturan menteri diatur peraturan daerah dan peraturan gubernur.

Karena punya kuasa atas desa, desa pun dijadikan obyek. Sehingga, perkembangan desa tidak sesuai nilai dan semangat UU Desa. Desa dihadapkan dengan pasal, ayat, syarat, dan prosedur dalam regulasi. Perda dan perbup dihadapkan dengan

desa. Dana Desa diberikan kepada desa tidak atas dasar keadilan dan kepercayaan kepada desa.

“Pendekatannya teknokratis. UU Desa diatur peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan bupati. Semangatnya hanya pasal, ayat, syarat, dan prosedur dalam perda dan perbup. Biasanya *copy-paste*. Jika asas rekognisi, maka salurannya langung dari pusat ke desa,” tegas Sutoro.

Sutoro menyebut kabupaten dan desa adalah organisme. Hubungan keduanya dalam bentang sejarah yang lama. Dia menyayangkan banyak kabupaten menganggap desa tidak sebagai organisme, tetapi dianggap sebagai pihak lain. Dalam hal kepentingan su-pradesa, kabupaten cenderung memeralat desa. Dalam hal kepentingan desa, kabupaten selalu membatasi dan menghambat desa, serta mengatur dan mengawasi desa. (*)



UU Desa Butuh Penyempurnaan

Didin Saputra

Penulis

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Devi Suhartoni mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Desa membutuhkan penyempurnaan. Perumusan UU Desa jangan dipukul rata di daerah kepulauan dan daerah pegunungan. Kemudian juga terjadi tumpang tindih regulasi dalam pemerintahan desa, antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.

“Perlunya pengaturan kembali terkait skala prioritas penggunaan dana desa serta penyamaan persepsi mengenai pertanggungjawaban desa. Karena terdapat perbedaan ketentuan pertanggungjawaban desa oleh masing-masing lembaga,” kata Bupati Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan itu, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu (22/1/2025).

Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang menjelaskan pemerintahan desa yang mirip negara kecil karena kepala desa dipilih rakyat dan memiliki perangkat, dan menyelenggarakan perencanaan dan



Devi Suhartoni (Foto Tribune Sumsel)

anggaran. Karena itu visi misi bupati harus selaras dengan visi misi kepala desa. “Dibutuhkan harmonisasi pelaksanaan teknis melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) desa harus sejalan dengan musrenbang kabupaten,” jelasnya.

Ketua Umum DPP Desa Bersatu Muhammad Asri Anas merekomendasikan harmonisasi kebijakan, karena diperlukan sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan kebutuhan desa, khususnya penggunaan dana desa. Kemudian, diperlukan ruang dialog pemerintah dengan perwakilan desa untuk memastikan kebijakan yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat desa.

“Bicara desa tidak boleh sepenggal. Sulit menyelesaikan masalah desa dalam satu dasawarsa. Apalagi jumlah desa 75.259 desa, termasuk



Asri Anas (Foto Istimewa)

“**Bicara desa tidak boleh sepenggal. Sulit menyelesaikan masalah desa dalam satu dasawarsa. Apalagi jumlah desa 75.259 desa, termasuk perangkat desa. Kalau perspektifnya otonomi daerah, tidak ketemu, maka kami tuntut revisi UU Desa. UU Desa perlu dievaluasi agar penataan desa efektif.**”

**Mantan Anggota
DPD RI,
Muhammad Asri Anas**

perangkat desa. Kalau perspektifnya otonomi daerah, tidak ketemu, maka kami tuntut revisi UU Desa. UU Desa perlu dievaluasi agar penataan desa efektif,” jelas mantan anggota DPD RI tersebut. (*)

BAP DPD RI Minta Kejagung Tindaklanjuti Temuan BPK RI

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal tersebut tertuang pada saat rapat konsultasi dengan Kejaksaan Agung RI.

“Kami mendorong agar laporan temuan BPK RI yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk ke Kejaksaan untuk segera ditindaklanjuti,” kata Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim dalam rapat konsultasi dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (22/1/25).

BAP DPD RI mencatat beberapa poin krusial dalam IHPS I 2024 diantaranya total nilai temuan sebesar Rp12,64 triliun dan jumlah temuan pada IHPS I 2024 meningkat menjadi 9.910 dari 9.261 pada IHPS I 2023. Peningkatan temuan ini dimungkinkan karena jumlah pemeriksaan meningkat. Pada IHPS I 2024 terdapat empat laporan keuangan kementerian dan



Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim menyerahkan cendera mata kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

lembaga yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pangan Nasional.

Terkait pemeriksaan terhadap pemerintah daerah, apabila dibandingkan dengan tahun 2022, berdasarkan tingkat pemerintahan terjadi penurunan persentase opini LKPD Tahun 2023 pada pemerintah provinsi dari 94 persen menjadi 84 persen dan pada pemerintah kabupaten dari 91 persen menjadi 89,6 persen.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak luput dari kekurangan

maupun temuan khususnya terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan. Karena itu, Kejaksaan akan berkoordinasi dengan BPK RI untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sehingga pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara tertib, taat asas, dan efisien.

“Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, Kejaksaan akan meminta bantuan untuk melakukan penghitungan kerugian negara kepada BPK RI atau auditor lainnya yang tersertifikasi. Hasil penghitungan kerugian negara itu dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk pembuktian di persidangan,” jelas Jaksa Agung. (*)



Kenaikan Upah Minimum Perlu Ada *Win-win Solution*



Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI bersama Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam dan Pakar Kebijakan Publik, Payaman J. Simanjuntak, usai menggelar RDPU. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Helena AF Ojan

Penulis

Pemerintah telah menetapkan upah minimum tahun 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Dalam pelaksanaan Permenaker tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan antara pengusaha dan pekerja.

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma menekankan harus ada solusi lebih lanjut akibat dari penetapan upah minimum tersebut. “Hakikatnya pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perihal

upah minimum sesuai yang ditetapkan pemerintah, namun perlu adanya win-win solution antara pengusaha dan pekerja,” kata Filep dalam pihak terkait dan pakar kebijakan publik, Selasa (21/1/2025).

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban dalam rapat tersebut mengapresiasi kenaikan upah minimum 6.5 persen, meski masih di bawah perhitungan internal KSBSI pada angka 7.74 persen. Menurut Elly, pekerja dan buruh di Indonesia berhak mendapatkan upah yang layak dan mampu menghidupi dirinya maupun keluarganya, sebagai dampak dari tingginya inflasi dan naiknya harga bahan

pokok.

Elly juga mengkhawatirkan akan terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dari kenaikan upah ini dan menyarankan agar menjadi perhatian pemerintah. “Kami berharap ada peran pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok, juga revisi UU Ketenagakerjaan yang baru dengan pengawasan terhadap kebijakan upah dan peningkatan proteksi sosial dan akses jaminan sosial bagi pekerja,” harap Elly.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menilai masukan dari dunia usaha sebagai aktor utama yang menjalankan kegiatan ekonomi, belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan dalam kenaikan upah minimum tersebut.

“Seringkali proses perundingan Dewan Pengupahan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terciptanya dialog yang harmonis dan konstruktif, sehingga menjadi tantangan untuk mencapai kesepakatan yang transparan, adil, dan berbasis musyawarah sebagaimana diharapkan,” katanya. (*)

Penting Kolaborasi OJK-DPD RI

Betria Eriani

Penulis

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi menyampaikannya pentingnya kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DPD RI untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan nasional. Kolaborasi antara legislatif dan regulator keuangan dapat menghasilkan solusi nyata yang mampu menjawab tantangan di sektor jasa keuangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pengawasan terhadap sektor jasa keuangan berjalan dengan transparan dan efektif, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta melindungi kepentingan masyarakat,” ujar Nawardi saat kunjungan kerja ke Perwakilan OJK Sumatera Utara, Senin (20/1/2025).

Anggota DPD RI Muhammad Nuh selaku Koordinator Tim Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI ke Sumut itu, menjelaskan Komite IV sebagai alat kelengkapan DPD RI membidangi lembaga keuangan dan perbankan/non perbankan. Dia menyebut berbagai persoalan di sektor jasa keuangan, mulai dari



Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi didampingi Senator dari Sumut Muhammad Nuh menerima cendera mata dari Kepala Kantor OJK Sumut Khoirul Muttaqien. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

pembiayaan UMKM, permasalahan pinjaman *online* (pinjol) serta permasalahan lainnya telah menarik perhatian banyak pihak.

“Oleh karena itu, guna mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terkait materi dimaksud, maka Komite IV memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,” jelas Muhammad Nuh.

Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik OJK Aman Santosa menjelaskan bahwa OJK sebagai lembaga independen

memiliki peran strategis dalam memastikan sektor jasa keuangan berjalan dengan teratur, adil, dan transparan.

Kepala Kantor OJK Sumut Khoirul Muttaqien dalam pemaparannya menjelaskan kinerja lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank di Sumut. Likuiditas bank umum di Sumut saat ini berada pada level yang lebih dari cukup dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Rasio kecukupan modal bank umum ataupun BPR/BPRS dalam menghadapi risiko berada dalam level yang aman. Hal tersebut terlihat dari kecukupan modal atau CAR bank umum yang mencapai 31,15 persen dan CAR BPR 26,39 persen. (*)

Belum Optimal Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Adhi Nugroho

Penulis

Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Novita Anakotta, menekankan pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam industri jasa keuangan. Pada kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Kantor Perwakilan OJK di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang berlangsung di Makassar pada Senin (20/1/2025), Novita mengungkapkan bahwa salah satu fungsi utama OJK adalah melindungi konsumen jasa keuangan. Namun, beliau menilai perlindungan ini masih belum optimal, terutama dalam penyelesaian sengketa dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, senator Andi Ihsan dari Sulawesi Selatan dan Maya Rumantir dari Sulawesi Utara juga menyoroti masalah serupa. Keduanya menekankan kebutuhan untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang aplikasi pengawasan pinjaman online, asuransi, dan investasi bodong yang masih marak terjadi.

Kepala OJK wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Hari Tangguh Wibowo, menyampaikan bahwa rendahnya tingkat literasi



Komite IV melakukan kunjungan kerja ke Kantor OJK Sulsebar, di Makassar. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

keuangan masyarakat menjadi faktor utama munculnya berbagai permasalahan di sektor ini. Oleh karena itu, meningkatkan literasi keuangan menjadi prioritas utama OJK untuk mencegah terjadinya penipuan dan memastikan perlindungan konsumen yang lebih baik.

Hari juga menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini dirancang untuk memperkuat kerangka perlindungan konsumen dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.

Lebih lanjut, OJK berinisiatif meningkatkan edukasi

masyarakat melalui berbagai program seperti OJK Goes to Community, OJK Goes to Campus, dan OJK Goes to School. Selain itu, program *Training of Trainers* (TOT) juga dijalankan untuk melatih guru, dosen, dan penyuluh, serta menyelenggarakan talk show di stasiun radio. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan pemahaman mereka tentang sektor jasa keuangan.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, OJK berupaya untuk secara kreatif dan sistematis melakukan edukasi ke seluruh wilayah kerja di Sulselbar. Upaya-upaya ini diharapkan dapat membawa masyarakat menuju tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi, serta mengurangi risiko penipuan dan masalah keuangan lainnya. (*)

Karo PHM Setjen DPD RI Terima Siswa SMP Tiara Aksara

Nanda Russia Rola

Penulis

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Tiara Aksara dari Kota Tangerang, Banten, melakukan *study tour* ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Kamis (23/1/2025). Mereka disambut oleh Kepala Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma, yang didampingi oleh Kepala Bagian Humas Nanang Agung BR.

Dalam kesempatan itu, Mahyu Darma menjelaskan tentang peran dan fungsi DPD RI sebagai lembaga negara yang merupakan perwakilan daerah. “DPD RI memiliki posisi yang setara dengan DPR RI. Anggotanya juga merupakan bagian dari MPR RI. Anggota DPD RI dipilih melalui pemilihan umum dengan pencalonan secara perorangan, bukan dari partai politik,” terang Mahyu.

DPD RI terdiri dari 152 anggota, dengan masing-masing provinsi di Indonesia diwakili oleh empat orang anggota. Mereka bersidang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu, anggota DPD RI berdomisili di daerah pemilihannya dan memiliki kantor perwakilan di ibu kota provinsi dari daerah



Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma (tengah) sedang memberikan penjelasan tentang ke-DPD-an kepada tamunya. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“DPD RI memiliki posisi yang setara dengan DPR RI. Anggotanya juga merupakan bagian dari MPR RI. Anggota DPD RI dipilih melalui pemilihan umum dengan pencalonan secara perorangan, bukan dari partai politik.”

Kepala Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma

pemilihan mereka.

Mahyu juga menjelaskan tentang tugas dan wewenang DPD RI, yang meliputi pengajuan dan pembahasan ran-

cangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta masalah yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dia membedakan antara DPR RI dan DPD RI, menjelaskan bahwa DPR RI adalah lembaga perwakilan politik yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari partai politik, sedangkan DPD RI adalah lembaga perwakilan daerah yang anggotanya dipilih secara perorangan. Anggota DPR RI mewakili rakyat berdasarkan jumlah penduduk, sedangkan DPD RI mewakili daerah berdasarkan wilayah geografis. (*)



Gelombang PHK di Indonesia

Oleh:

Rindang Mustikawati

Analisis legislatif Ahli Muda di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran-Setjen DPD RI

“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu isu penting di Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perubahan regulasi di sektor ketenagakerjaan. Angka PHK meningkat secara signifikan pada paruh pertama tahun 2024. Menurut IMF, Indonesia memiliki tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara anggota ASEAN lainnya pada April 2024, dengan persentase pengangguran mencapai 5,2 persen, sedikit lebih tinggi 0,1 persen dari Filipina. Di beberapa daerah, jumlah pekerja yang terkena PHK meningkat hingga puluhan kali lipat.”

Kementerian Ketenagakerjaan mendata tenaga kerja yang terkena PHK hingga 26 September 2024 mencapai 52.993 orang. Sebanyak 45,31% atau 24.013 tenaga kerja berasal dari industri pengolahan. PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah mencapai 14.767 orang. Angka tersebut di-

ikuti oleh Banten sejumlah 9.114 orang dan DKI Jakarta sebanyak 7.469 orang. Ada tiga sektor penyumbang PHK tertinggi, yakni sektor pengolahan dengan total 24.013 tenaga kerja, sektor aktivitas jasa lainnya 12.853 tenaga kerja, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan 3.997 tenaga kerja.

Pemutusan Hubungan Kerja massal di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi

ekonomi global, dampak pandemi, ketergantungan pada pasar ekspor, persaingan internasional, kebijakan para investor, perubahan model bisnis, serta transformasi digital yang meliputi otomatisasi dan kemajuan teknologi AI. Hal yang paling berkontribusi terhadap terjadinya PHK massal di Indonesia adalah ketidakpastian ekonomi dan resesi global.

Tingginya tren PHK ini berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat, yang tercermin dari terjadinya deflasi selama dua bulan berturut-turut (Mei-Juni 2024). Kenaikan suku bunga acuan juga turut memperburuk tekanan daya beli masyarakat, karena meningkatkan beban cicilan pinjaman masyarakat.

Kekhawatiran PHK massal juga berakibat terjadinya pengurangan atau penyetopan perekrutan karyawan baru yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Laporan Talent

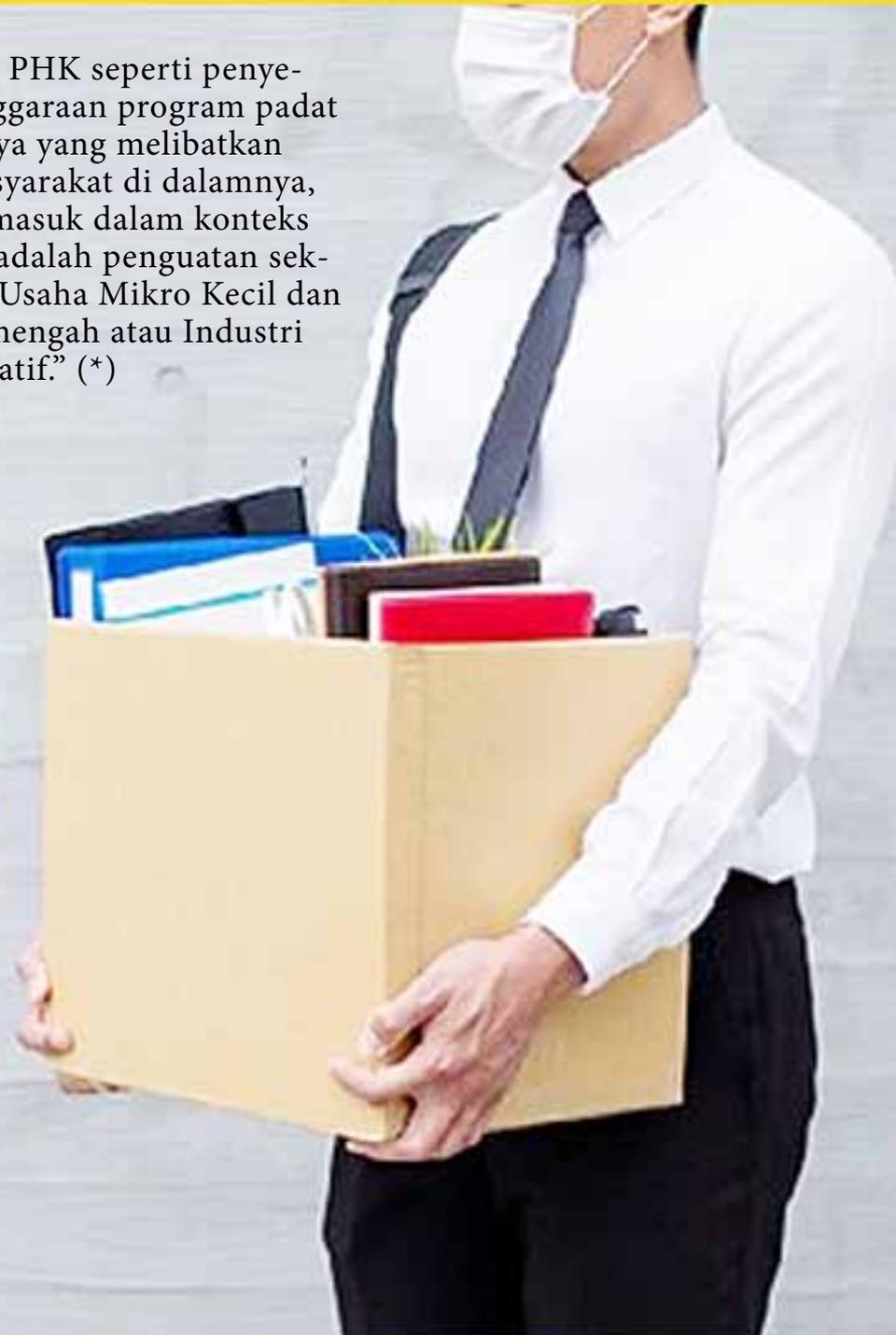




Acquisition Insights 2024 oleh Mercer Mettl mencatat bahwa 69% perusahaan di Indonesia menghentikan perekrutan karyawan pada 2023, angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 50%.

Pemerintah perlu melakukan antisipasi terhadap gelombang PHK ini sehingga tidak menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian Indonesia. *Pertama*, perlu ada evaluasi kembali mengenai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, karena peraturan ini dicurigai menjadi penyebab maraknya produk-produk impor yang berakibat pada lesunya industri di tanah air. *Kedua*, perlu ada peningkatan daya beli masyarakat, misalnya dengan memberikan jaminan stabilitas harga sehingga terjangkau oleh masyarakat. Terakhir, perlu ada langkah lain untuk mengantisipasi kor-

ban PHK seperti penyelenggaraan program padat karya yang melibatkan masyarakat di dalamnya, termasuk dalam konteks ini adalah penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Industri Kreatif.” (*)



Ilustrasi Nedia Apakabar.Com





PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Selamat Memperingati



**"Jadilah pers yang selalu independen, jujur, berani, dan terpercaya
dalam menyuarakan kebenaran"**

9 Februari 2048 - 9 Februari 2025



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

